



# Warga Rentan Jadi Sasaran Bantuan

## ■ Pemkot Yogya Segera Alokasikan 2 Persen DTU untuk Perlindungan Sosial

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai menggodok upaya perlindungan sosial bagi warga masyarakat rentan, melalui alokasi 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Kebijakan ditempuh sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Aman Yuridijaya pun menandatangani pihaknya mendapat kucuran Rp3,7 miliar dari total DTU di trivulan ke empat tahun 2022. Jikalau mengacu pada Permenkeu tersebut, alokasi 2 persen dapat diarahkan untuk bantuan sosial bagi pelaku transportasi ojek, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, hingga nelayan.

"Itu yang sedang kami kaji. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, bisa segera dirasakan masyarakat. Tapi, ini belum bisa kami sampaikan secara spesifik karena masih proses kajian. Inshaallah bulan ini, akhir September kami sudah hasilkan kebijakan konkret," terang Aman, Jumat (9/9).

Hanya saja, ia menandakan, pemanfaatan 2 persen DTU tersebut, memang dititikberatkan untuk jaminan sosial bagi masyarakat rentan. Nantinya, setelah menemukan formula yang paling realistis, serta tepat sasaran, pihaknya segera berkomunikasi dengan legislatif. Sehingga, imbas dari kenaikan banderol BBM bisa secepatnya ditekan.

"Yang jelas, itu kami laksanakan dan dalam waktu dekat segera dieksekusi. Sifatnya lebih perlindungan masyarakat. Karena, memang ada mekanisme mekanisme normatif yang harus dilakukan. Paling penting saat ini, masyarakat yang kategori miskin, harus dapat jaminan," tandasnya.

**TIDAK TUMPANG TINDIH**

- Pemkot Yogyakarta godok upaya perlindungan sosial bagi warga masyarakat rentan.
- Upaya ini dilakukan melalui alokasi 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).
- Kebijakan ditempuh sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi.
- DPRD berharap agar penyaluran bantuan tidak tumpang tindih.

"Salah satunya, yang masuk bahasan kami, adalah opsi menggelar operasi pasar. Itu termasuk pilihannya. Makanya ditunggu dulu, satu, atau dua minggu ke depan, sudah ada rumusan untuk masyarakat nanti," tambah Sekda.

Menurutnya, perlindungan sosial memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan inflasi, akibat lonjakan harga BBM. Sebagai informasi, berdasarkan data sampai Juli 2022, inflasi di Kota Yogyakarta mencapai 5,7 persen yoy. Dengan langkah tersebut, elaya beli warga masyarakat diharapkan tidak menurun drastis. Sehingga, katanya, harga deretan kebutuhan pokok di pasaran harus tetap kondusif.

"Kami ingin membangun situasi yang kondusif di tengah masyarakat supaya tidak bergejolak, dinamika harga jangan sampai terlalu ekstrem. Jadi, kami melakukan komunikasi dengan semua elemen agar psikologis pasar ini tetap terjaga, biar masyarakat juga tenang kan," urainya.

Di samping itu, di tengah potensi dinamika inflasi yang menganga di depan mata, pihaknya juga harus memastikan pasokan kebutuhan pokok menuju Kota Yogyakarta terus terjaga. Bukan tanpa alasan, sebagai daerah yang meng-

andalkan distribusi dari daerah lain, ia pun tak punya pilihan.

"Karena kita ini kan daerah konsumen, jadi pasokan harus dipastikan kelancarannya. Harapan kami, dinamikanya tidak besar, sepanjang distribusi terjaga," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Oleg Yohan, menandatangani, hingga kini, Pemkot masih mengkaji formulasi pendistribusian bantuan sosial tersebut. Namun, ia mendorong, supaya Pemkot cermat sehingga tak ada fenomena tumpang tindih.

"Makanya, harapan kami, itu bisa masuk BTT (Biaya Tidak Terduga). Kemudian, didistribusikan untuk masyarakat yang belum dapat," tegas Oleg.

Dia menjelaskan, selain bantuan sosial yang bersifat reguler, pemerintah pusat juga menggulirkan beberapa BLT, sebagai upaya menekan imbas kenaikan harga BBM. Oleh sebab itu, politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut mendorong pemerataan ragam bantuan itu.

"Harapan kami, dinas-dinas terkait bisa mendata lebih konkret. Memang tidak bisa sempurna, tapi harus ada upaya dari Pemkot untuk menekan dampak kenaikan harga BBM. Jadi, jangan dobel-dobel," tandas Oleg. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005